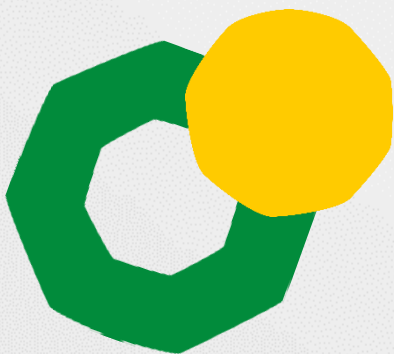




DJKN
KANWIL BALINUSRA

LAPORAN KINERJA

2023



PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja dimaksud sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2023. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023. Dalam LAKIN 2023 dilakukan berdasarkan hasil capaian IKU seluruh kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai dengan Peta Strategis Kanwil Balinusra Tahun 2023.

Harapan kami LAKIN Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban, sebagaimana harapan pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah mencapai pada angka 115,51 %.

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Denpasar, 31 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 154/ PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu menghadirkan sikap yang *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang harus selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai cerminan dari salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *good governance*.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Kanwil menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Bidang Penilaian;
- d. Bidang Piutang Negara;
- e. Bidang Lelang;
- f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara meliputi 3 provinsi yaitu :

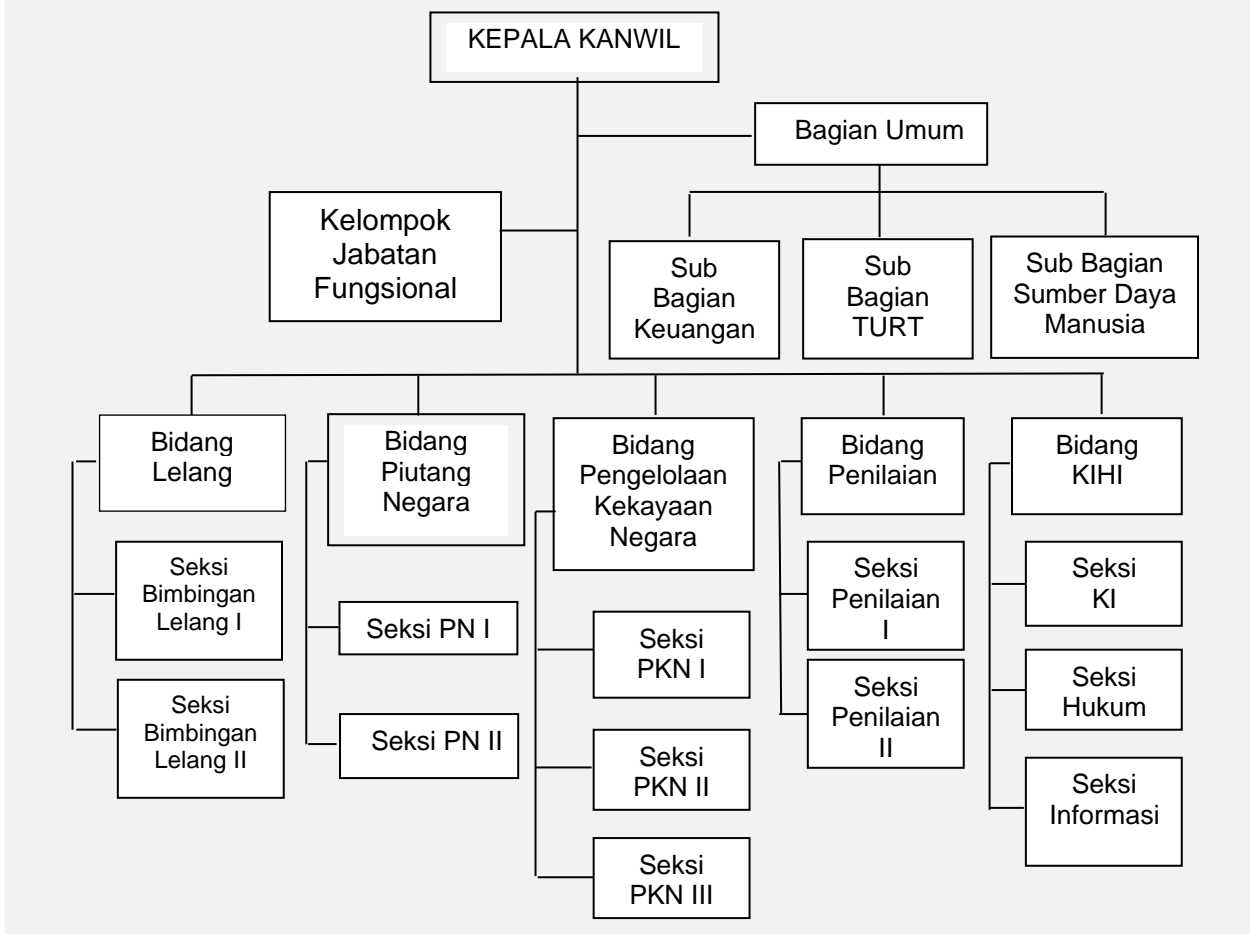
1. Propinsi Bali;
2. Propinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara membawahi 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu :

1. KPKNL Denpasar;
2. KPKNL Singaraja;
3. KPKNL Mataram;
4. KPKNL Bima; dan
5. KPKNL Kupang.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat di gambarkan seperti di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA



Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sampai dengan akhir tahun 2023 untuk mendukung tugas dan fungsi DJKN sebanyak 182 pegawai masing-masing terdiri dari pegawai Kanwil sebanyak 37 pegawai, KPKNL Denpasar sebanyak 36 pegawai, KPKNL Singaraja sebanyak 29 pegawai, KPKNL Mataram sebanyak 26 pegawai, KPKNL Bima sebanyak 26 pegawai dan KPKNL Kupang sebanyak 28 pegawai dengan omposisi per Golongan, Jabatan dan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel : 1.1 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per Golongan)

SATKER/GOLONGAN	GOL.IV	GOL.III	GOL II	Jumlah
KANTOR WILAYAH	15	19	3	37
KPKNL DENPASAR	3	29	4	36
KPKNL SINGARAJA	2	21	6	29
KPKNL MATARAM	1	17	8	26
KPKNL BIMA	2	16	8	26
KPKNL KUPANG	1	18	9	28

Tabel : 1.2 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per jabatan)

JABATAN					
	ESELON II	ESELON III	Kelompok Pejabat Fungsional	ESELON IV	PELAKSANA
KANTOR WILAYAH	1	5	3	15	13
KPKNL DENPASAR	0	1	11	5	19
KPKNL SINGARAJA	0	1	7	5	16
KPKNL MATARAM	0	1	7	5	13
KPKNL BIMA	0	1	5	4	16
KPKNL KUPANG	0	1	6	4	17

Tabel : 1.3 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai pendidikan)

PENDIDIKAN							
	S3	S2	S1	D3	D1	SMU	SMP
KANTOR WILAYAH	2	14	13	2	3	3	-
KPKNL DENPASAR	-	8	20	3	3	1	1
KPKNL SINGARAJA	-	2	15	7	2	3	-
KPKNL MATARAM	-	2	15	5	1	3	-
KPKNL BIMA	-	4	13	7	1	1	-
KPKNL KUPANG	-	2	13	7	2	4	-

C. Peran Strategis

Sebagai unit eselon II di Lingkungan DJKN, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, diberi tanggung jawab untuk mengawal dan mewujudkan visi dan misi DJKN yang telah ditetapkan, yaitu:

Visi:

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya tujuan tersebut maka peran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan, yang diimplementasikan pada masing-masing bagian/bidang sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Peran Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan Kanwil yang tertib dan lancar.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)

Peran Bidang PKN dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Bidang Penilaian

Peran Bidang Penilaian dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian yang cepat, tepat, dan cermat di lingkungan Kanwil.

4. Bidang Piutang Negara

Peran Bidang Piutang Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan

persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara secara baik sehingga tercapai pengurusan piutang negara yang optimal.

5 Bidang Lelang

Peran Bidang Lelang dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang di lingkungan Kanwil yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI)

Peran Bidang KIHI dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah mendukung terwujudnya bahan bimbingan dan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan implementasi pengelolaan kinerja, pemantauan dan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan implementasi manajemen risiko pada Kanwil, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penanganan perkara, pemberian pendapat hukum (legal opinion), dan pelaksanaan bantuan hukum, serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian pelayanan informasi, koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dan hubungan masyarakat yang cepat, tepat dan cermat di lingkungan Kanwil.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja 2023 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Perjajian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang, Penilaian yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat berpedoman pada visi dan Misi DJKN. Adapun visi DJKN adalah **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai Visi dimaksud Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2023 telah menetapkan Target Kinerja dengan menandatangani Kontrak Kinerja yang tertuang dalam 9 Sasaran Strategis dan 20 Indeks Kinerja Utama (IKU).

B. Visi Dan Arah Kebijakan

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan jajarannya sebagai institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Disamping itu juga terus berupaya melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari kementerian/lembaga yang pengurusannya diserahkan ke PUPN/DJKN. Dalam hal pelayanan lelang, terus diupayakan penggalan potensi lelang eksekusi maupun non eksekusi sehingga lelang dapat dikenal dan dijadikan sebagai salah satu sarana transaksi jual beli yang diminati oleh masyarakat.

2. Pelayanan Secara Professional Dan Bertanggungjawab

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang secara professional dan bertanggungjawab mengandung arti bahwa Kantor Wilayah dan jajarannya (KPKNL) dalam melakukan pelayanannya menjunjung etika professional yaitu dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

3. Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat.

Kanwil beserta jajarannya berusaha memberikan layanan terbaik sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai cita-cita dan arah dari pengelolaan kekayaan negara untuk

kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk di dalamnya pengurusan piutang dan optimalisasi layanan lelang.

C. Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan

Visi yang telah dihadirkan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 6 (enam) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Realisasi Kanwil dan KPKNL dalam melaksanakan misi di atas adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan sistem komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
- Menyediakan informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;
- Menjadi *revenue center* dengan memaksimalkan PNBPN, hasil dari pemanfaatan bmn, bea lelang, dan biaya administrasi penagihan piutang negara.

Implementasi terhadap misi yang akan dicapai telah ditetapkan dalam pola dan tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil beserta jajarannya yang meliputi:

- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi Pemerintah;
- Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
- Peningkatan pelayanan penilaian;
- Optimalisasi pengurusan piutang Negara;

- Peningkatan pelayanan lelang;
- Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Upaya Kanwil untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun dalam sasaran strategis yang akan ditempuh dalam suatu periode tertentu. Sifatnya spesifik, dapat dinilai dalam angka, dan berorientasi pada jangka waktu tertentu (1 tahun), yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif, dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal;
9. Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang Efektif.

Secara keseluruhan Program Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Tahun 2020-2024

D. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023 didasarkan pada peta strategis *Kemenkeu Two* dan berpedoman pada visi dan misi yang diterjemahkan dalam empat perspektif, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Nomor PK-26/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-26A/KN/2023 tanggal 22 September 2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2023, sebagai berikut :

1. *Stakeholder perspective (30%)*

Perspektif yang berkaitan dengan *stakeholder* Kantor Wilayah untuk mengetahui kinerja yang paling utama yang terdiri dari :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		1c-CP	Indeks integritas	88,67

2. Customer perspective (20%)

Perspektif yang berorientasi kepada pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan pada Kanwil yang terdiri dari satker, penyerah piutang dan penanggung hutang, serta pemohon lelang dan pembeli lelang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%

3. Internal Proses perspective (25%)

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam internal organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder* yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		3b-N	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	94%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		4b-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%

		4c-CP	Persentase BMN berupa tanah yang Disertifikatkan	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat efektifitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	86%

4. Learning and Growth perspective (25%)

Merupakan sumber daya intern Kantor Wilayah yang dimiliki sebagai modal seluruh jajaran untu terus belajar memperbaiki diri dan terus tumbuh dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)
		7a1-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 Skala 4)
		7a2-N	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	100 (90%)
		7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		8b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-N	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	15%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang Efektif	9a-N	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60
		9b-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar **115,51%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Perspektif	2022		2023	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	25	29,82	30	33,78
Customer	15	16,17	20	22,87
Internal Process	30	33,53	25	29,42
Learning & Growth	30	31,70	25	29,44
TOTAL NKO		111,22		115,51

Catatan Status NKO :

NKO > 100 = Istimewa

90 ≤ NKO ≤ 100 = Baik

70 ≤ NKO < 90 = Butuh perbaikan

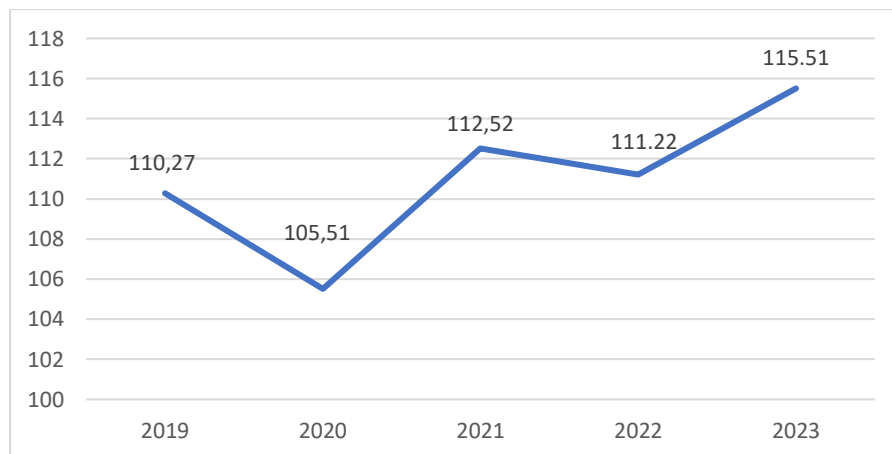
50 ≤ NKO < 70 = Kurang

NKO < 50 = Sangat kurang

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Selama tahun 2023, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki 20 IKU dengan berstatus semua IKU berwarna hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,51. Tren NKO dalam 5 tahun terakhir dan hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2023 dapat dilihat berikut:

Grafik 3.2
Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 5 Tahun Terakhir



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Realisasi (Indeks Max. 120%)
	Stakeholder Perspective (30%)				33,78%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				112,59%

1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	118,62%	118,62%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	94,86%	118,57%
1c-CP	Indeks integritas	P/M	88,67	89,17%	100,56%
Customer Perspective (20%)					22,87%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				114,33%
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	108,66%	108,66%
2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	150,27%	120,00%
Internal Process Perspective (25%)					29,42%
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				120,00%
3a-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	122,91%	120,00%
3b-N	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	P/M	94%	99,60%	120,00%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				110,72%
4a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	68%	82,12%	120,00%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102,49%	102,49%
4c-CP	Persentase BMN berupa tanah yang Disertifikatkan	P/L	100%	109,95%	109,95%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,24%	120,00%
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	P/M	70	100	120,00%

6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				120,00%
6a-CP	Tingkat efektifitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	P/M	86%	104,79%	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)					29,44%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif				120,00%
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100 (95%)	120,00	120,00%
7a1-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	100 (3,55 Skala 4)		
7a2-N	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	P/M	100 (90%)		
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal				113,33%
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100 (95,5%)	120	120,00%
8b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100%	100%
8c-N	Deviasi data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	15%	0%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang Efektif				120,00%
9a-N	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	P/M	60	90,77	120,00%
9b-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	P/H	80	96,18	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					115,51%

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2023 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berhasil memperoleh NKO 115,51% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2023 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

Tabel 3.4
SS Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan			112,59%	
	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari	100%	118,62%	118,62%

		pengelolaan kekayaan negara dan lelang			
	1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	94,86%	118,57%
	1c-N	Indeks integritas	88,67	89,17	100,56%

a. (1a-CP) IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Isu Utama

Kondisi perekonomian masyarakat tahun 2023 pasca pandemi Pandemi Covid-19 memang mulai terjadi pemulihan, meskipun belum sepenuhnya berjalan optimal seperti sebelum pandemi.

Namun demikian, dengan perencanaan kinerja, melakukan monev capaian kinerja secara intensif, mengidentifikasi dan optimalisasi aset, mengidentifikasi BKPN yang berpotensi, peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* lelang, serta didukung kerjasama yang baik dan upaya keras dari kantor operasional, realisasi capaian kinerja PNBPN telah melebihi target tahun 2023.

Implikasi

Diperlukan upaya maksimal (*extra effort*) untuk optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Akar Masalah

Diperlukan identifikasi secara simultan/terus-menerus atas potensi pengelolaan aset, berkas piutang negara, dan lelang, dan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Koordinasi secara intensif pada KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa monev berkala, pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan track trajectory yang harus dicapai dalam tiap tahapan per triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi aset, BKPN, dan lelang yang berpotensi oleh KPKNL.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2023	100%	118,62%
2022	100%	117,80%
2021	100%	133,77%
2020	100%	77,60%
2019	-	-

b. (1b-CP) Persentase produktivitas lelang**Isu Utama**

Pengukuran produktivitas lelang bertujuan agar lelang semakin dikenal masyarakat sebagai media transaksi yang akuntabel, efisien, efektif. Produktivitas lelang dinilai dari intensitas frekuensi lelang yang laku per jenis lelang dan memperhitungkan proporsi realisasi frekuensi lelang tahun sebelumnya dengan realisasi tahun ini. Formula perhitungan IKU ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Implikasi

Produktivitas lelang berperan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lelang sebagai media transaksi yang akuntabel, efisien, dan efektif. Lelang yang tidak laku berimplikasi pada citra lelang yang tidak efisien bagi pemohon.

Akar Masalah

Masih tingginya Lelang TAP (tidak ada peminat/penawaran).

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi ke KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG dalam rangka capaian target.

2. Berkoodinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan terus berkoordinasi dengan Pemohon Lelang (Perbankan) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Memberi usulan kepada perbankan/pemohon lelang agar menetapkan harga limit lelang dengan nilai likuidasi pada lelang ke-2 atau ke-3.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2023	80%	94,86%
2022	36%	43,84%
2021	35%	48,94%
2020	34%	46.09%
2019	32%	43.29%

c. (1c-N) IKU Indeks integritas

Isu Utama

IKU ini merupakan **IKU baru** yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Penilaian integritas dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Implikasi

Kepercayaan publik kepada institusi dan unit kerja.

Akar Masalah

Penilaian integritas didasarkan atas persepsi dan pengalaman, baik dari responden internal (pengalaman pegawai) maupun responden eksternal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pemantauan pengendalian intern secara periodik, sosialisasi anti korupsi, pengendalian gratifikasi, dan penguatan integritas.

Rekomendasi Rencana Aksi

Penguatan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas, sosialisasi anti korupsi, peningkatan kualitas layanan.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tabel 3.7
SS Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			114,33%	
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	108,66%	108,66%
	2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	150,27%	120,00%

a. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Isu Utama

Pokok Lelang terdiri dari pokok lelang yang berasal dari lelang KPKNL/Pelelang/PL I dan lelang Pegadaian, dimana pelaksanaan lelang Pegadaian di luar kendali dan kewenangan KPKNL/Kanwil DJKN.

Implikasi

Pencapaian lelang pegadaian berpengaruh terhadap target lelang secara keseluruhan.

Akar Masalah

Pelaksanaan dan hasil lelang pegadaian sulit diprediksi dan kesulitan dalam upaya pemenuhannya.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir, lelang pegadaian semakin turun di propinsi Bali, hal ini disebabkan perekonomian Bali semakin naik sejak pasca pandemi. Selain itu, proses bisnis di Pegadaian meminimalisir lelang sehingga capaian lelang semakin turun.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan koordinasi ke KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG dalam rangka capaian target dan koordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan/BUMN, untuk mengoptimalkan lelang KPKNL/Pelelang/PL I.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengoptimalkan hasil lelang KPKNL dengan melaksanakan koordinasi dengan para KPKNL serta penggalian potensi lelang ke Pemohon Lelang (Perbankan) dan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Realisasi Pokok Lelang	Target	Realisasi
2023	100%	108,66%
2022	100%	107,18%
2021	100%	162,34%
2020	100%	73,64%
2019 (tertulis Persentase Hasil Lelang)	100%	136.77%

b. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**Isu Utama**

Target penurunan Outstanding Piutang Negara yang dikelola/diurus KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 8.286.410.672, perlu dilakukan upaya penurunan tingkat Outstanding Piutang Negara melalui

proses pengurusan yang efektif serta optimal dalam penyelesaiannya baik melalui pengelolaan Penyerah Piutang maupun melalui proses pengurusan yang telah diserahkan kepada KPKNL. Dari hasil realisasi capaian kinerja per Triwulan IV (Q4), Penurunan Outstanding PN Kanwil DJKN Bali Nusra telah melebihi target tahunannya, yakni tercapai 150,27% dengan rincian sbb:

Tabel 3.9
Outstanding Piutang Negara

No	Unit Kerja	Raw Data Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp)	Capaian 2023 (%)
1	Kanwil Balinusra	8.286.410.672	12.451.847.607	150,27%
2	KPKNL Denpasar	5.300.000.000	9.013.148.887	170,06%
3	KPKNL Singaraja	718.806.375	872.008.901	121,31%
4	KPKNL Mataram	1.244.772.832	1.271.861.285	102,18%
5	KPKNL Bima	280.831.465	371.634.475	132,33%
6	KPKNL Kupang	742.000.000	923.194.059	124,42%

Implikasi

Efektivitas pengurusan dalam penurunan outstanding piutang negara.

Akar Masalah

Masih besarnya Outstanding Piutang Negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan koordinasi secara intensif pada KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa monev berkala, pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan *track trajectory* yang harus dicapai dalam tiap tahapan per triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi BKPN berpotensi untuk KPKNL yang belum memenuhi target secara *trajectory* maupun tahunan.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2023	100%	150,27%
2022	100%	149,29%
2021	100%	112,41%
2020	3%	162,73%
2019	-	-

3. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tabel 3.11
SS Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			120,00%
	3a-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	122,91%	120,00%
	3b-CP Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	94%	99,60%	120,00%

a. (3a-N) Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Isu Utama

Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dan penyampaian rekomendasinya perlu ditindaklanjuti oleh satker.

Implikasi

Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Akar Masalah

Belum optimalnya evaluasi pengelolaan aset dan tindak lanjut rekomendasinya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rapat koordinasi dengan KPKNL melalui zoom meeting terkait penyampaian data target evaluasi kinerja BMN dan tindak lanjutnya kepada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mendorong KPKNL guna menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN serta memantau dan mendorong tindak lanjut rekomendasi.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	Target	Realisasi
2023	100%	122,91%
2022	100%	117,60%
2021	100%	110,09%
2020	100%	107,82%
2019	-	-

b. (3b-N) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction.**Isu Utama**

E-auction merupakan pelaksanaan lelang melalui internet oleh KPKNL yang diharapkan menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Pelaksanaan lelang melalui internet diharapkan lebih maksimal, sedangkan pelaksanaan lelang secara konvensional sangat selektif serta mengedukasi para stakeholder untuk memanfaatkan E-auction.

Implikasi

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif;
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang ; dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Akar Masalah

Masih adanya stakeholder yang meminta lelang secara konvensional serta keengganan dalam memenuhi persyaratan dokumen secara elektronik.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi ke KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG..
2. Koodinasi dan edukasi dengan pemohon lelang dari Perbankan/BUMN dan Pejabat Lelang Kelas II dalam rangka meningkatkan realisasi capaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Para KPKNL dan Pemohon Lelang (khususnya Perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara)

**Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU**

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2023	94%	99,60 %
2022	92%	98,91%
2021	92%	98,90%
2020	90%	94,43%
2019 (tertulis:persentase implementasi e-auction)	90%	99,47%

4. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Tabel 3.14
SS Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			110,72%	
	4c-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	82,12%	120,00%
	4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	102,49%	102,49%
	4c-CP	Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan	100%	109,95%	109,95%

a. (4a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Isu Utama

Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai dengan SBSK. Hasil pengukuran tingkat kesesuaian juga merupakan data masukan dalam langkah optimalisasi BMN.

Implikasi

Postur kesesuaian penggunaan BMN dapat diukur dan rencana optimalisasinya.

Akar Masalah

Masih terdapat penggunaan BMN yang belum mengacu pada SBSK.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Monitoring dan evaluasi atas pengukuran tingkat kesesuaian dan optimalisasi hasil pengukuran.

Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi dan bimbingan kepada KPKNL di wilayah kerja.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2023	68%	82,12%
2022	65%	80,00%
2021	62%	75,59%
2020	55%	75.01%
2019	-	-

b. (4b-CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Isu Utama

Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya. Kriteria pengakuan capaian yaitu atas BKPN Lunas, Penarikan BKPN, Pengembalian BKPN, dan BKPN PSBDT, serta adanya Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat. Hasil realisasi capaian kinerja per Triwulan IV (Q4) untuk Penyelesaian BKPN pada Kanwil DJKN Bali Nusra telah melebihi dari *trajectory*-nya, yakni tercapai 102,49% (dari target *Trajektori* Q4 sebesar 100%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

No	Unit Kerja	Target Tahun 2023	Realisasi s.d. Desember 2023	Capaian 2023 (%)
1	Kanwil Balinusra	1569	1608	102,49%
2	KPKNL Denpasar	1397	1406	100,64%
3	KPKNL Singaraja	70	86	122,86%
4	KPKNL Mataram	21	25	119,05%
5	KPKNL Bima	16	21	131,25%
6	KPKNL Kupang	65	70	107,69%

Implikasi

Berkurangnya berkas kasus yang diurus dan menurunnya outstanding BPKN yang produktif.

Akar Masalah

Belum optimalnya penyelesaian BPKN lama.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Koordinasi secara intensif pada KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa monev berkala, pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan *track trajectory* yang harus dicapai dalam tiap tahapan per triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi BPKN berpotensi untuk KPKNL yang belum memenuhi target secara tahunan.
2. Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung atau melalui komunikasi lainnya, melalui chat WA, telepon, dsb).

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Target	Realisasi
2023	100%	102,49%
2022	100%	102,82%
2021	100%	107,03%
2020	100%	122,63%
2019	-	-

c. (4c-CP) Persentase BMN berupa tanah yang Disertifikatkan**Isu Utama**

Output sertifikasi berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP), Peta Bidang Tanah (PBT), atau produk lainnya, update data pada master aset SIMAN dan validasi sertifikasi tanah (Valserah). Dalam pelaksanaannya ditemui kendala antara lain:

1. Satuan kerja lambat dalam penyampaian dokumen kelengkapan permohonan sertifikasi.
2. Terdapat bidang tanah yang telah ditargetkan tidak dapat di lanjutkan proses sertifikasi.

Implikasi

1. Kantor pertanahan tidak dapat segera melaksanakan proses sertifikasi.
2. Terjadi penggantian lokasi bidang tanah sehingga memerlukan perubahan SK Penlok.

Akar masalah

1. Satker mengalami kendala dalam proses kelengkapan berkas dan identifikasi keberadaan fisik bidang tanah yang menjadi target sertifikasi.
2. Bidang Tanah masuk kawasan hutan.
3. Beberapa bidang tanah yang masuk target nominatif dibatalkan oleh satker karena akan melalui program sertifikasi mandiri.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rapat koordinasi dengan Kanwil BPN, KPKNL, dan satker pengguna tanah yang masuk dalam program sertifikasi terkait rencana kerja, mitigasi permasalahan yang ada dan pembahasan alternatif solusi.
2. Monitoring dan Evaluasi ke masing-masing KPKNL setiap bulan.
3. Mendorong Satker dan KPKNL untuk mencari bidang tanah pengganti atas tanah yang tidak dapat di sertifikasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan rapat koordinasi program sertifikasi BMN Tahun 2023 pada masing-masing wilayah provinsi.
2. Melaksanakan Monev Sertifikasi BMN Tahun 2023 pada masing-masing wilayah

3. Mendorong untuk pelaksanaan prasertifikasi.
4. Verifikasi penambahan target sertifikasi BMN Wilayah NTB.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU

Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2023	100%	109,95%
2022	100%	104,60%
2021	100%	103,30%
2020	100%	100.19%
2019	100%	100%

5. Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Tabel 3.19
SS Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%	
	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,24%	120,00%
	5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	70	100	120,00%

a. (5a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Isu Utama

Terdapat selisih antara nilai persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola BMN dengan nilai wajar hasil penilaian.

Implikasi

1. Berpotensi tidak tercapainya target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian.
2. Output hasil penilaian Tim Penilai diragukan kewajaran nilainya.

Akar Masalah

Karena nilai yang diajukan oleh Satker dalam permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN di atas harga pasar.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan kaji ulang terhadap semua laporan penilaian yang disampaikan ke kanwil. Salah satu point yang dikaji ulang adalah terkait dengan metodologi penilaian. Sehingga dengan metodologi penilaian yang sudah benar dilakukan oleh Tim Penilai maka hasil penilaian akan mencerminkan Nilai Wajar.
2. Berkoordinasi baik secara non formal maupun formal melalui FGD dan Nota Dinas kepada KPKNL dimana pada intinya Nota Dinas menghimbau kepada para Jafung Penilai di lingkungan KPKNL untuk menyampaikan permasalahan apabila terdapat kendala yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan IKU tersebut.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengupdate *issue* / perkembangan terakhir terhadap IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian secara rutin minimal sekali setiap bulan.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian IKU

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Target	Realisasi
2023	25%	0,24%
2022	19%	1,75%
2021	22%	4,91%
2020	30%	3,76%
2019	-	-

b. (5b-CP) Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, untuk mengukur penyelesaian layanan penilaian, dalam rangka mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Isu Utama

Pelaksanaan Penilaian yang melebihi tenggat waktu sebagaimana SOP.

Implikasi

SOP Penilaian tidak terpenuhi

Akar Masalah

Waktu penyelesaian Penilaian melebihi target

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan monitoring dan berkoordinasi bersama KPKNL secara rutin
- Berkoordinasi bersama Pemohon Penilaian secara informal
- Memastikan permohonan penilaian sudah dilakukan melalui aplikasi SIP.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Berkoordinasi bersama KPKNL untuk menyampaikan permasalahan apabila terdapat kendala yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan IKU tersebut.
- Berkoordinasi bersama Pemohon Penilaian

6. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Tabel 3.21
SS Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			120,00%
	6a-CP Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	107,79%	120,00%

(6a-CP) Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Isu Utama

Masih terdapat surat persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti.

Implikasi

Namun demikian secara secara IKU tidak berimplikasi karena capaian yang telah melampaui yang ditargetkan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan pengelolaan kekayaan negara.

Akar Masalah

Terdapat calon mitra yang membatalkan karena nilai sewa atau nilai yang disetujui melampaui nilai yang diharapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Peningkatan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka wasdal Pengelolaan BMN, khususnya tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN oleh Kanwil DJKN maupun KPKNL.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPKNL.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	Target	Realisasi
2023	86%	107,79%
2022	85%	94,53%
2021	85%	96,29%
2020	80%	97,13%
2019	50%	184.08%

7. Sasaran Strategis: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Ekosistem Kolaboratif

Tabel 3.23
SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Ekosistem Kolaboratif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			120%
	7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu 100 (95%)	120%	120%
	7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai 100%	120%	120%

a. (7a-N) Tingkat Implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu

IKU yang merupakan IKU baru pada tahun 2023, yang bertujuan untuk memastikan implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah berjalan dengan optimal, dengan mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan Kemenkeu Kewilayahan. Pengukuran IKU difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah, yaitu: 1. Join program penerimaan, 2. RCE, 3. Sinergi UMKM. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 mendapatkan capaian maksimal, karena implementasi kegiatan Kemenkeu Satu tidak hanya terealisasi pada 3 fokus kegiatan tersebut, tapi juga dibentuk Pokja *Island*

of Integrity, dimana Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai Ketua Pokja, dan telah melaksanakan banyak kegiatan yang terkait dengan penguatan integritas dan sosialisasi anti korupsi. Selain itu, pada Sekretariat Sekber, telah diimplementasikan kegiatan kehumasan Kemenkeu Satu.

Isu Utama

1. Sinergi antar unit.
2. Efektivitas komunikasi publik.

Implikasi

Kualitas sinergi antar unit berpengaruh atas efektivitas implementasi kegiatan dan urgensi mengamplifikasi berita-berita/konten-konten terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Akar Masalah

Kolaborasi dalam implementasi kegiatan terkendala tugas-tugas unit yang berbeda. Adanya berita atau konten terkait kesalahan informasi atau isu-isu negatif di masyarakat.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- a. Penguatan budaya Kemenkeu Satu melalui kegiatan bersama pada momen khusus seperti Hari Oeang, Hakordia
- b. Selain implementasi kegiatan Join program penerimaan, RCE, dan Sinergi UMKM, juga telah dilaksanakan implementasi kegiatan Pokja *Island of Integrity*, sehingga realisasi implementasi kegiatan melampaui target fokus kegiatan.
- c. Melakukan *press release*
- d. Konferensi APBN
- e. Mengupload konten-konten atau berita di medsos seperti IG, Youtube, twitter.

Rekomendasi Rencana Aksi

Amplifikasi kegiatan Kemenkeu lebih ditingkatkan.

b. (7b-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Isu Utama

Pengembangan kompetensi pegawai harus memenuhi minimal 30 jamlat. Jadwal dan jenis pelatihan yang tersedia kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan tiap pegawai.

Implikasi

Tidak terpenuhinya jamlat minimal dalam pengembangan pegawai.

Akar Masalah

Kebutuhan kompetensi yang beragam sesuai tusi pegawai maupun pengembangan di luar tusi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Monitoring atas pemenuhan jamlat pegawai secara berkala.
2. Mengikutkan pegawai dalam diklat yang dijadwalkan kantor pusat (baik PJJ, maupun hybrid)

Rekomendasi Rencana Aksi

Merekomendasikan agar pegawai membuat rencana pengembangan individual (IDP) dengan cermat.

Agar pegawai dapat mengikuti pengembangan secara mandiri melalui e-learning, microlearning pada KLC BPPK.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Target	Realisasi
2023	100%	120,00%
2022	100%	120,00%
2021	100%	120,00%
2020	100%	120,00%
2019	87%	98,00%

8. Sasaran Strategis: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

Tabel 3.25
SS Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal			113,33%	
	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5 %)	120	120,00%
	8b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	100%	100,00%
	8c-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0%	120,00%

a. (8a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Isu Utama

Realisasi rencana kerja tidak sesuai jadwal dan penyerapan anggaran tidak optimal.

Implikasi

Terjadinya revisi rencana penarikan dana maupun penyerapan dana yang tidak optimal berpengaruh terhadap nilai IKPA.

Akar Masalah

Rencana kegiatan dan anggaran yang terealisasi oleh bidang teknis tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga nilai deviasi Hal III DIPA dan penyerapan anggaran di setiap triwulan tidak optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Membuat rencana kegiatan dan anggaran setiap triwulan;
2. Melakukan simulasi perhitungan IKU PKPA;

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan disetiap triwulan;
2. Konsisten dalam membuat rencana penarikan dana agar sesuai dengan Hal III DIPA;
3. Melakukan monitoring pada aplikasi SMART DJA;
4. Melakukan simulasi perhitungan IKU PKPA sampai dengan periode pelaporan.

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian IKU

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target	Realisasi
2023	100 (95,5%)	120
2022	95,00%	96,84%
2021	95,5%	95,75%
2020	95%	99,58%
2019	95%	86,41%

b. (8b-N) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan, dengan mengukur proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN, dan pemanfaatan aplikasi pengadaan, pada unit Kementerian Keuangan selaku Pengguna/satker.

Isu Utama

Mekanisme pengelolaan BMN dan pengadaan implementasinya sangat tergantung dengan aplikasi.

Implikasi

Terkendalanya pengelolaan BMN dan pengadaan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang tersedia.

Akar Masalah

Pengadaan BMN sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dan tersedia di aplikasi pengadaan belum didukung dengan anggaran yang memadai sehingga realisasi pengadaan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melaksanakan pengadaan BMN dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyusun RKBMN lebih cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran memadai.

c. (8c-CP) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782 (PL I).

Isu Utama

Akurasi Data PNBP disebabkan:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 dan 425782 pada aplikasi Dropbox pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Implikasi

Semakin besar selisih data menyebabkan semakin besar deviasi data PNBP.

Akar Masalah

Sumber data tidak hanya diperoleh dari satu sumber dan potensi salah input.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Validasi dan monev data terhadap masing-masing sumber data PNBP.

Rekomendasi Rencana Aksi

Pembinaan teknis kepada petugas input data dropbox lelang dan Fokus PN, dan koordinasi untuk sinkronisasi data .

**Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IKU**

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	Target	Realisasi
2023	15%	0%
2022	10%	1,91%

2021	12,5%	3%
2020	-	-
2019	-	-

9. Sasaran Strategis: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Tabel 3.28
SS Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif			120,00%
9a-N	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	90,77	120,00%
9b-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80	96,18	120,00%

a. (9a-N) Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif

Isu Utama

Pengukuran atas pelaksanaan tugas UKI, yang terdiri dari 11 unsur penilaian.

Implikasi

Hasil pengukuran menggambarkan keyakinan atas efektivitas tugas UKI.

Akar Masalah

Unsur penilaian meliputi 11 unsur, dan jadwal yang cukup padat.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Mengatur rencana kerja kegiatan UKI untuk efektivitas pelaksanaan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja UKI, dan pendokumentasian dengan baik.

b. (9b – N) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko**Isu Utama**

IKU ini ditetapkan untuk mengetahui perkembangan kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko, sehingga menghasilkan umpan balik positif bagi perbaikan organisasi di masa mendatang.

Implikasi

Kualitas dalam pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai, dan manajemen risiko berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian perencanaan strategis.

Akar Masalah

Pemahaman dalam penyusunan rencana kinerja dan mitigasi risiko perlu ditingkatkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan melakukan pembinaan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kepegawaian, serta manajemen risiko.

Rekomendasi Rencana Aksi

Sosialisasi dan monev pengelolaan kinerja dan risiko secara berkelanjutan.

B. Inisiatif Strategis

Pada tahun 2023 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menetapkan 1 (satu) Inisiatif Strategis (IS) yaitu :

IKU : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

IS : Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN

Tindak lanjut optimalisasi BMN pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dengan melibatkan Koperasi Cahaya Mina PKPJ dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan menginisiasi proyek pembangunan Desa Devisa Uang Vaname

Obyek Optimalisasi :

Aset Tanah BMN pada satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, di desa Pengambangan Kabupaten Jembrana.

a. Rencana Proyek Optimalisasi

Pemanfaatan tanah BMN seluas 8.000 m² untuk kegiatan pengembangan masyarakat melalui pemanfaatan lahan sebagai tambak udang budidaya udang vaname dengan melibatkan Koperasi Cahaya Mina PKPJ yang terdiri dari komunitas nelayan dan pembudidaya udang yang tergabung dalam 8 kelompok usaha bersama, dan sebagai sarana pelatihan mahasiswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

b. Progres Kegiatan

Launching kegiatan tanggal 15 Maret 2023, melalui pelatihan dan pendampingan penguatan manajemen usaha tambak dan teknis budidaya udang vaname, dilaksanakan melalui sinergi LPEI, Kanwil DJKN Bali Nusra, dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana ;

c. Kendala/Akar Masalah

Upaya pemberdayaan masyarakat/UMKM terkendala dengan kesiapan dan pola pikir masyarakat dalam mengadopsi usaha dan cara-cara yang baru.

d. Upaya yang telah dilakukan

Selain pelatihan dan pendampingan melalui sinergi dengan LPEI, juga dilakukan *knowledge sharing* terkait ekspor bersama DJBC. Untuk peningkatan kapasitas produksi juga telah diberikan bantuan melalui pengadaan kolam tambak.

e. Output

Output dari kegiatan ini dapat dilihat dari 2 aspek, yakni

1. Dari sisi hasil

Panen perdana udang vaname tanggal 20 Juli 2023, sekaligus peresmian Desa Devisa Udang Vaname. Hadir pada kegiatan ini antara lain LPEI, Tim Pojok SMV Kanwil DJKN Bali Nusra, satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, anggota Komisi XI DPR, dan anggota pembudidaya udang.

2. Dari sisi esensi kegiatan

▪ Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

Optimalisasi pemanfaatan BMN dapat berperan untuk memfasilitasi upaya pengembangan masyarakat melalui pembudidaya udang vaname.

- Dukungan pendidikan mahasiswa
Pemanfaatan BMN menjadi tambak udang berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi mahasiswa.

C. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.023.702.000,00 dan direvisi menjadi 3.439.724.000,00 dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp.2.959.393.375,00 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp.480.330.625,00 dan telah disetor Kembali ke kas Negara.

Isu utama dalam kualitas anggaran ini adalah menunggu jadwal realisasi pelaksanaan kegiatan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan satgas BLBI. Hal ini menyebabkan deviasi antara rencana dengan realisasi DIPA.

Adapun kendala dalam pencapaian IKU adalah :

- a. Rencana Penarikan Dana tidak sesuai dengan realisasi penarikan dana;
- b. Aplikasi SAKTI sering mengalami gangguan;
- c. Terakit dengan Aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA, kewenangan berada pada DJPb dan DJA.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi secara intensif dengan bidang teknis terkait;
 1. Berkoordinasi dengan KPPN terkait gangguan sistem aplikasi SAKTI.
 2. Berkoordinasi secara intensif dengan KPKNL Denpasar, Singaraja, Mataram, Bima, Kupang dan Bagian Keuangan KP DJKN terkait aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA.
 3. Bersinergi yang efektif terkait Capaian Output bidang teknis dengan bagian umum, sehingga penginputan capaian output pada aplikasi Sakti dapat dilaksanakan lebih cepat.
 4. Untuk pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (korwas) secara rutin setiap awal bulan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau Sasaran Strategis Tahun 2023. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang dilakukan dalam Tahun 2023 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya kinerja maka peran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

Dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menggunakan Pengukuran kinerja dalam *BSC* merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) SS dan dijabarkan kedalam 20 IKU sebagaimana yang telah tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023, capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan *BSC*, mendapatkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 115,51 % sesuai tabel sebagai berikut :

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

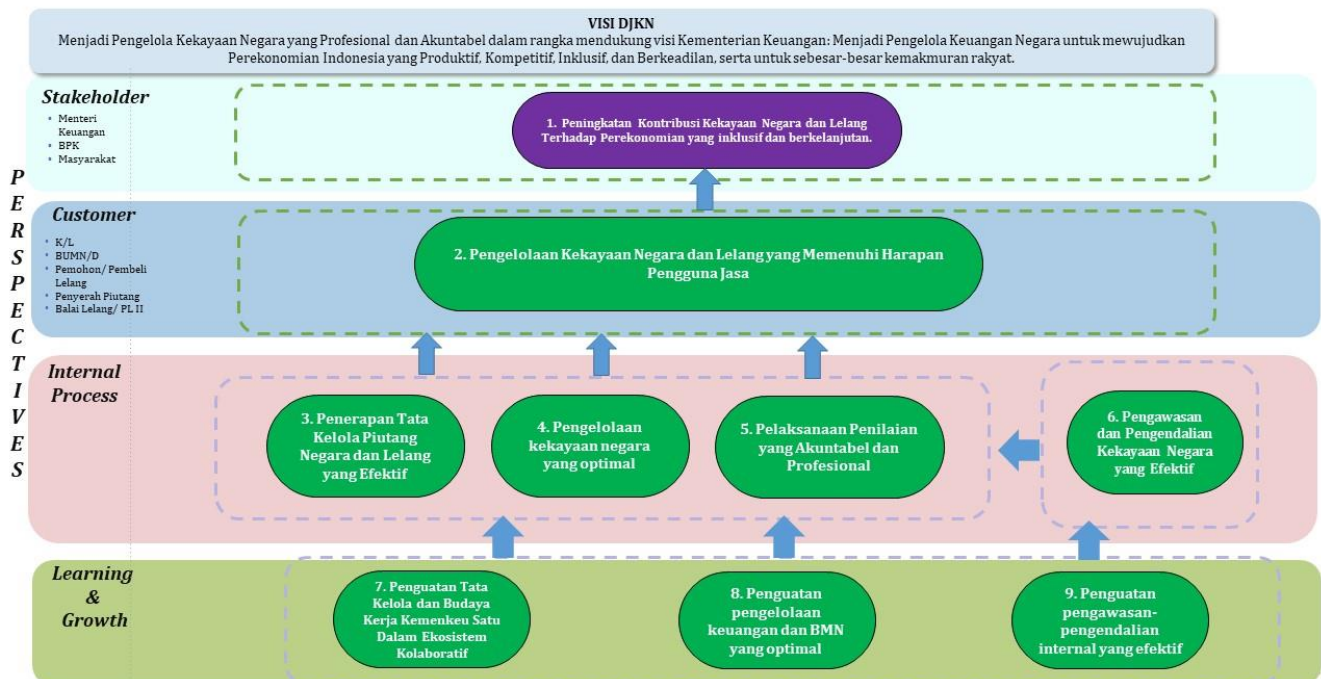
Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)	30%						33,78%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112,59%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	118,62%	14%	33%	118,62%	118,62%	hijau
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	94,86%	14%	33%	118,57%	118,57%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	14%	33%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)	20%						22,87%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							114,33%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	108,66%	14%	50%	108,66%	108,66%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	150,27%	14%	50%	150,27%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						29,42%	
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							120,00%	
3a-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	122,91%	14%	50%	122,91%	120,00%	hijau
3b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	235,15%	14%	50%	250,16%	120,00%	hijau
4	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							110,72%	
4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	68%	82,12%	14%	30%	120,76%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102,49%	14%	30%	102,49%	102,49%	hijau
4c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100%	109,95%	19%	40%	109,95%	109,95%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,24%	14%	50%	199,03%	120,00%	hijau
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	100	14%	50%	142,86%	120,00%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							120,00%	
6a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	106,05%	14%	100%	123,31%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,44%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							113,33%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100,00%	14%	33%	100,00%	100,00%	hijau
8c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							120,00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60,00	90,77	14%	56%	151,28%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/H	80,00	96,18	11%	44%	120,22%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKD)								115,51%	hijau

Capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIN harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, dan juga harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kanwil DJKN dan KPKNL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat melalui pemberian pelayanan yang lebih optimal.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-26/KN/2023
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
3.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	3a-N Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%
		3b-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		4b-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4c-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		5b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)
		7a1-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)
		7a2-N Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP Indeks integritas organisasi	96,22
		9a1-CP Indeks integritas	88,67
		9a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (lvl 4)
		9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
		9c-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 48,768 ,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 28,227 ,000
3. Pengelolaan Aset	Rp 661,712 ,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 4,736 ,000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp 14,748 ,000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2,204,071,000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 21,312 ,000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 40,128 ,000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Nendro



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
3b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100	100	100	100
	7a1-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
	7a2-N Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	96,22	96,22
	9a1-CP Indeks Integritas						88,67	88,67
	9a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100 (Lv 4)	100 (Lv 4)
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
9c-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Nendro



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Nendro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Wahyu Nendro, S.E., M.A.P.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197110061997031002	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina TK. I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	Penerima Layanan
3.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Sub IKI-2	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	Penguatan Internal atau Anggaran
			Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	Penguatan Internal atau Anggaran
			Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)		Indeks Integritas Organisasi	96,22	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-1	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Lv 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
			Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN					

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA

6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro
197110061997031002



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban
196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
6	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
7	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%



8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
10	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
11	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
12	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		70	70	70	70	70	70	70
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	50%	-	50%	86%	86%
14	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100	100	100	100
	Sub IKI-1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100 (3,55 skala 4)
	Sub IKI-2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%



18	Indeks Integritas Organisasi		-	-	-	-	-	96,22	96,22
	Sub IKI-1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	Sub IKI-2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Lv 4)	100 (Lv 4)
19	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	-	-	-	60	60
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	80	80
KONSEKUENSI									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro

197110061997031002



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

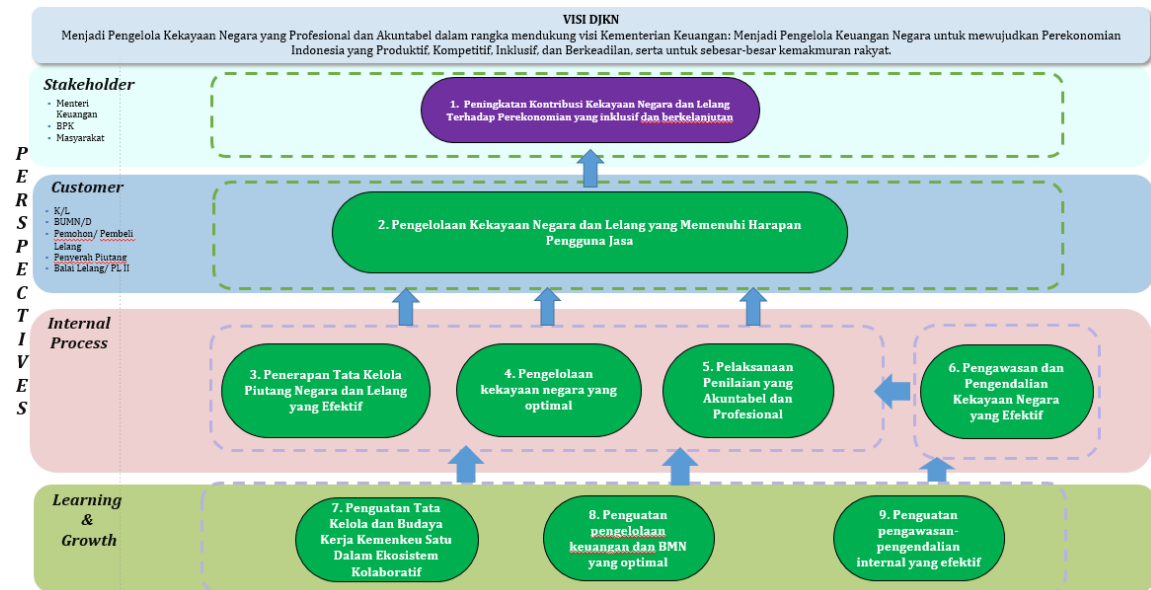
196604231990101001



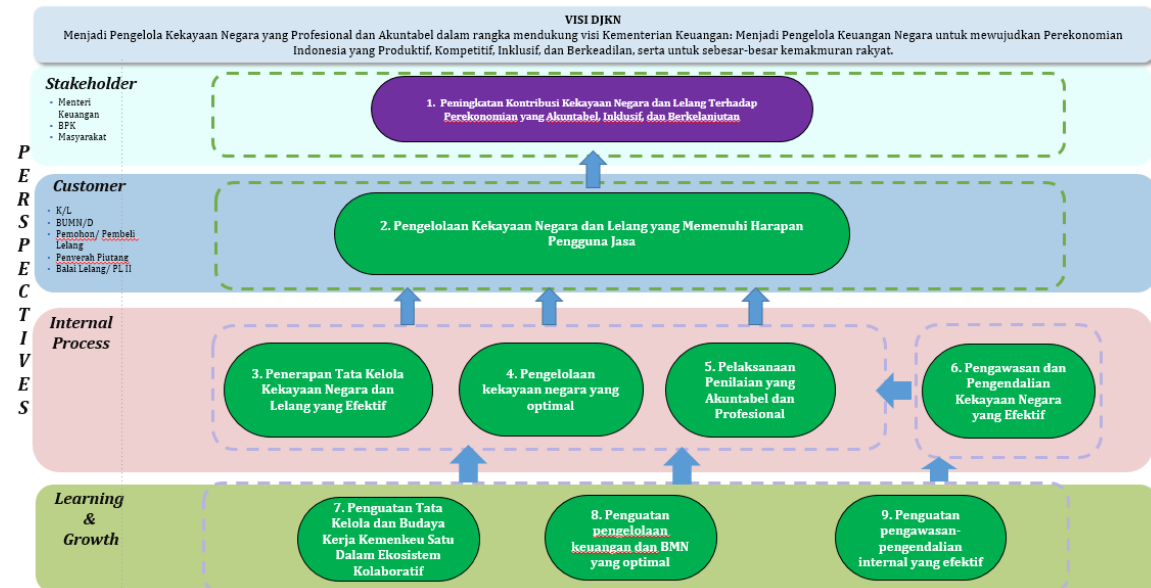
ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-26A/KN/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-26/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
3	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

b. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU	Nama IKU/Sub-IKU
4c-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	3a-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

c. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
9a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67

d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
<i>Customer perspective</i>						<i>Internal process perspective</i>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
2c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	4c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%
<i>Internal process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
3	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
3a-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
<i>Internal process perspective</i>						<i>Internal process perspective</i>					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
4c-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	3a-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

e. Penghapusan IKU dan Sub-IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9a-CP	Indeks integritas organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara karena Sub-IKU Indeks integritas bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dihapus.
9a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

f. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100 (95%)	7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100
7a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	100 (3,55 Skala 4)	7a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)
7a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%	7a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 10 Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	94,21 %	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	95,85%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	95,56%	Penerima Layanan
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	Penerima Layanan
3	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	99,29%	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis

Sebelum					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100 (95%)	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 Skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan Internal/ Anggaran
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas Organisasi		94,33	Penguatan Internal/ Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		60	Penguatan Internal/ Anggaran
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	Penguatan Internal/ Anggaran

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		94,21%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang		80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas		88,67	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang		95,85%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		95,56%	Penerima Layanan
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	Proses Bisnis

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
	Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction		94%	Proses Bisnis
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		68%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		99,29%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		100%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 Skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		100	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	Penguatan Internal/ Anggaran
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		60	Penguatan Internal/ Anggaran
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	Penguatan Internal/ Anggaran

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil Kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	94,21%	94,21%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	94,21%	94,21%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	95,85%	95,85%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	95,56%	95,56%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	95,85%	95,85%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	95,56%	95,56%
6	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	6	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
7	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	7	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	99,29%	99,29%	9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	99,29%	99,29%
10	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	10	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%
11	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	11	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
12	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien		70	70	70	70	12	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien		70	70	70	70
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindakan Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	86%	86%	13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindakan Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	86%	86%
14	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100 (85%)	100 (85%)	100 (95%)	100 (95%)	14	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100
	Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	100 (3,55 skala 4)		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
	Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		75%	75%	100%	100%	15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran		95,5	95,5	95,5	95,5	16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran		100	100	100	100
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	-	100%	100%	17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	-	100%	100%
18	Indeks Integritas Organisasi		-	-	94,33	94,33	18	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Sub- IKI 1	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67							
	Sub- IKI 2	Indeks maturitas penyeleng- garaan SPIP	-	-	100	100							
19	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	60	60	19	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	60	60
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	80	80	20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	80	80

Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 22 September 2023

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



**NILAI KINERJA ORGANISASI
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)	30%						33,78%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112,59%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	118,62%	14%	33%	118,62%	118,62%	hijau
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	94,86%	14%	33%	118,57%	118,57%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	14%	33%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)	20%						22,87%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							114,33%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	108,66%	14%	50%	108,66%	108,66%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	150,27%	14%	50%	150,27%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						29,42%	
3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							120,00%	
3a-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	122,91%	14%	50%	122,91%	120,00%	hijau
3b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	235,15%	14%	50%	250,16%	120,00%	hijau
4	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							110,72%	
4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	68%	82,12%	14%	30%	120,76%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102,49%	14%	30%	102,49%	102,49%	hijau
4c-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100%	109,95%	19%	40%	109,95%	109,95%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,24%	14%	50%	199,03%	120,00%	hijau
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	100	14%	50%	142,86%	120,00%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							120,00%	
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	107,79%	14%	100%	125,34%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,44%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							113,33%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100,00%	14%	33%	100,00%	100,00%	hijau
8c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							120,00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60,00	90,77	14%	56%	151,28%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/H	80,00	96,18	11%	44%	120,22%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115,51%	hijau

Mengetahui,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono
NIP 196912141996031002



Ditandatangani secara elektronik
Soeparjanto
NIP 197004291996031001



SS.1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
1c-N	Indeks Integritas

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	tidak ada (IKU baru) v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
3a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.3	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
3b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
4c-CP	Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
5b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
6a-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
8b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
8c-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif
9a-N	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2023	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v